



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI RIAU

IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN

TAHUN 2025

Nomor : 481/IKHTISAR/INSP-RIAU/Ir.III
/XII/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

 (0761) 22300, Fax 23256

 inspektorat.riau.go.id

 Jl. Cut Nyak Dien - Pekanbaru



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya "Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2025 " ini telah selesai disusun.

Penyusunan Ikhtisar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap upaya pencapaian dalam pelaksanaan tugas pengawasan maupun tugas penunjang lainnya.

Ikhtisar ini berisi data pemeriksaan dan hasil tindak lanjut pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), data mengenai jumlah pengaduan masyarakat yang telah disampaikan serta progres penyelesaiannya.

Sebagai produk dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2025 ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Ikhtisar ini sebagai tolak ukur kinerja. Melalui data tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat membuat rencana kerja dan menetapkan target penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berorientasi hasil, relevan, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Pada Kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Plt Gubernur dan Sekretaris Daerah yang telah memberikan arahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2025 ini.

Pekanbaru, Januari 2026

PI. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Ir. Agus Rianto, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196808091993031004

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GRAFIK	IV
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	VI
BAB I: INFORMASI UMUM	9
A. DASAR HUKUM	9
B. KEDUDUKAN TUGAS/FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT	10
C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN	14
D. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASI	14
BAB II: HASIL PENGAWASAN	29
A. AUDIT	29
B. REVIU	36
C. EVALUASI	40
D. MONITORING DAN EVALUASI	41
E. MONITORING	42
F. PENDAMPINGAN/ADVISORY	43
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	46
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI).....	46
B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP	47
BAB IV: PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	48
BAB V: SIMPULAN,HAMBATAN, DAN REKOMENDASI	49
A. SIMPULAN	49
B. HAMBATAN	49
C. REKOMENDASI	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Riau	13
Tabel 2 Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	15
Tabel 3 Temuan Hasil Audit Dana Hibah APIP Tahun 2025	32
Tabel 4 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana Hibah APIP Tahun 2025	34
Tabel 5 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2025	35
Tabel 6 Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2025	35
Tabel 7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2025	36
Tabel 8 Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan	36
Tabel 9 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2025	43
Tabel 10 Pendampingan/Advisory Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/ Audit Dan Tindaklanjut APIP Tahun 2025	47
Grafik 2 Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus Tahun 2025	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Profil Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Riau.....	13
Gambar 2	Profil Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Riau.....	13
Gambar 3	Audit ketaatan.....	31
Gambar 4	Audit Dana Hibah	32
Gambar 5	Reviu.....	39
Gambar 6	Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Tahun 2025	40
Gambar 7	Evaluasi	40
Gambar 8	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	42
Gambar 9	Pendampingan	44
Gambar 10	Jumlah Objek Audit/ Evaluasi Yang Telah/ Belum Menerapkan SPI Tahun 2025.....	45
Gambar 11	Pemantauan BPK RI	46
Gambar 12	Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2005 s.d. Tahun 2025.....	46
Gambar 13	Pemantauan APIP	47

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Berdasarkan data hasil audit yang dilakukan oleh APIP selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2025 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Audit Kinerja
- b. Audit Ketaatan
- c. Audit BUMD
- d. Audit Pengawasan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah
- e. Laporan Probity Audit
- f. Audit Dana Hibah
- g. Audit Perjalanan Dinas
- h. Audit Pengelolaan Kas dan Deposito (*Cash Opname*)
- i. Audit Tujuan Tertentu
- j. Audit Honorarium
- k. Selain audit berkala tersebut, terdapat kegiatan pengawasan lain, yaitu :
 1. Laporan Hasil Klarifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Pedamaran II pada Ruas Jalan Bagan Siapi api - Teluk Piyai (Kubu) Tahun Anggaran 2024.
 2. Laporan Hasil Audit atas Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perkantoran Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
 3. Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Kegiatan yang sedang berjalan pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
 4. Laporan Hasil Klarifikasi Atas Pelaksanaan Perpisahan Sekolah Di SMA/SMK se- Provinsi Riau.
 5. Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Pembayaran Tunjangan Anak yang diberikan kepada anak ASN dengan Status Kuliah yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Kuliah.
 6. Laporan Hasil Audit Renovasi Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi Riau yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
 7. Laporan Hasil Rekomendasi Atas Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Paket Pekerjaan Rehabilitas Jalan Produksi.
 8. Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pembangunan.
 9. Reviu RKPD oleh APIP.
 10. Reviu KUA PPAS Murni dan Perubahan.
 11. Reviu Renja OPD 2026.
 12. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 13. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJiP).
 14. Reviu Pelayanan Publik.
 15. Reviu SSH, ASB dan HSPK.
 16. Reviu Atas Manajemen ASN dan Rotasi, Promosi dan Mutasi.
 17. Reviu DAK.
 18. Reviu HPS.
 19. Reviu Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).
 20. Reviu BMD.
 21. Reviu atas Bantuan Sosial.

22. Reviu RUP.
23. Reviu Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah.
24. Laporan Hasil Reviu Rencana Penanganan Jembatan Sei Rokan Kiri pada Ruas jalan Tandun - Pasir Pangaraian Menggunakan Dana BTT.
25. Laporan Hasil Reviu Penyajian Hutang di Neraca atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dumai - Lubuk Gaung - Batu Teritip (Batas Kab. Rokan Hilir) Tahun Anggaran 2024 Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
26. Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
27. Laporan Hasil Reviu Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM Irbansus pada Inspektorat Kabupaten.
28. Laporan Reviu Dokumen Pembayaran Acara Pengunduran dan Pembatalan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Provinsi Riau Tahun 2025.
29. Laporan Hasil Reviu Atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Perwakilan Riau TA 2024 atas Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Provinsi Riau.
30. Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja Tidak terduga Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Tahun Anggaran 2025.
31. Laporan Hasil Reviu usulan Anggaran Pengadaan Mebelair Pasca Kebakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
32. Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
33. Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
34. Evaluasi Atas Upaya Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
35. Evaluasi penurunan prevalensi stunting.
36. Evaluasi Penggangguran Terbuka.
37. Evaluasi Pengendalian inflasi.
38. Evaluasi Peningkatan Investasi.
39. Evaluasi Swasambada Pangan.
40. Evaluasi Terhadap Rasio Gini.
41. Evaluasi MR.
42. Evaluasi Reformasi Birokrasi tematik dan general.
43. Evaluasi SAKIP OPD.
44. Evaluasi atas SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
45. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
46. Monev Terhadap Mitigasi dan Pemenuhan Eksistensi *Fraud Control Plan* (FCP).
47. Monitoring Capaian IKK pada aplikasi CRCM.
48. Monitoring atas kepatuhan LHKASN/LHKPN.
49. Monitoring Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi (MCP KPK).
50. Monitoring Capaian IKK pada aplikasi CRCM.
51. Monitoring atas BKK Desa.
52. Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025.

53. Laporan Monitoring Penangan Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SSMA dan SMK Di Provinsi Riau.
 54. Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Pembayaran Tunjangan Anak yang diberikan kepada anak ASN dengan Status Kuliah yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Kuliah.
 55. Asistensi atas Implementasi SPIP.
 56. *Quality Assurance* atas pelaksanaan SPIP.
 57. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.
 58. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar.
 59. Pendampingan Tim BPK.
 60. Asistensi atas penyusunan *Fraud Control Plan* (FCP).
 61. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP LVL 4.
 62. Asistensi Manajemen Risiko.
 63. Laporan Hasil Pendampingan Program Strategis Nasional di Provinsi Riau.
- I. Pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Tahun 2025 yaitu LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat 19 temuan dan 97 rekomendasi, telah dilakukan Pemantauan atas TLHP.

Pekanbaru, Januari 2026

Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Ir. Agus Rianto, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196808091993031004

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Laporan sebagaimana dimaksud disusun oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam bentuk Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Gubernur.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Selanjutnya secara berkala Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Tembusan laporan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal di atas, dan untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Riau menyampaikan ikhtisar yang disusun dalam satu buku Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2025 .

B. KEDUDUKAN TUGAS/FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Tentang Struktur Organisasi Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Tentang Struktur Organisasi Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
- b. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- c. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- 4) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 8) Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan untuk Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari:

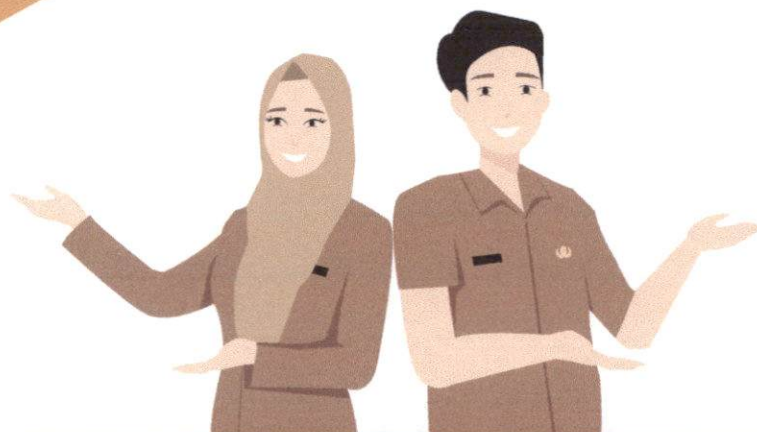
- Inspektur
- Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Ketua Tim Teknis Perencanaan
 - c. Ketua Tim Teknis Analisis dan Evaluasi
- Inspektur Pembantu I, membawahi jabatan fungsional:
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Inspektur Pembantu II, membawahi jabatan fungsional:
 - a. Auditor
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Inspektur Pembantu III, membawahi jabatan fungsional:
 - a. Auditor
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Inspektur Pembantu IV, membawahi jabatan fungsional:
 - a. Auditor

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Inspektur Pembantu V, membawahi jabatan fungsional:
 - a. Auditor
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

C. PROFIL / KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT DAERAH

Jumlah pegawai negeri sipil Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebanyak 149 orang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum dengan rincian:

- a. Pejabat Struktural sebanyak 7 orang terdiri dari:
 - Plt.Inspektur Daerah : Ir. Agus Rianto, MT
 - Sekretaris : Ir. Agus Rianto, MT
 - a. Subbag Administrasi dan Keuangan : Riant Valery Putra Eldi, S.STP
 - Inspektur Pembantu I : Dino Predi, S.STP, M.Si
 - Plt. Inspektur Pembantu II : Marhadi, S.Sos
 - Inspektur Pembantu III : Baihaqi, SE, Ak
 - Inspektur Pembantu IV : Jondra J. Manurung, SE, M.Si
 - Inspektur Pembantu V : Salny Daliati, SH, M.Si
- b. Pejabat Fungsional sebanyak 102 orang terdiri dari:
 - Auditor dengan jumlah 64 orang terdiri dari:
 - a. Auditor Ahli Madya : 12 orang
 - b. Auditor Ahli Muda : 31 orang
 - c. Auditor Ahli Pertama : 15 orang
 - d. Auditor Penyelia : 1 orang
 - e. Auditor Mahir : 4 orang
 - f. Auditor Terampil : 1 orang
 - Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), jumlah 38 orang terdiri dari:
 - a. PPUPD Utama : 1 orang
 - b. PPUPD Madya : 19 orang
 - c. PPUPD Muda : 14 orang
 - d. PPUPD Pertama : 4 orang



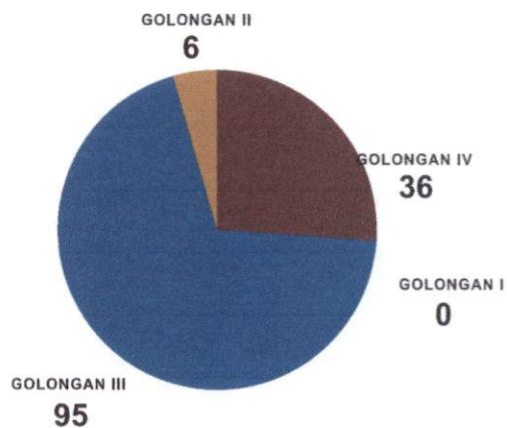
Profil Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	S3	-
2	S2	38
3	S1	90
4	DIII	10
5	DII	-
6	DI	-
7	SLTA	11
8	SLTP	0
Jumlah		149

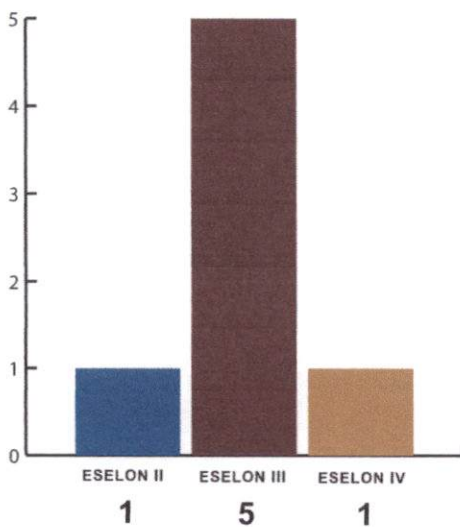
Tabel 1
Profil Kepegawaian Inspektorat
Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan golongan



Gambar 1
Grafik Profil Kepegawaian Inspektorat
Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Eselon



Gambar 2
Grafik Profil Kepegawaian Inspektorat
Daerah Provinsi Riau

D. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan bertujuan memberikan informasi secara menyeluruh dari LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Ikhtisar ini memuat Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Ketaatan, pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) maupun pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Selanjutnya penyusunan Ikhtisar ini akan mempermudah pelaksanaan monitoring/ evaluasi dan perkembangan tindak lanjut. Selain itu ikhtisar laporan hasil pengawasan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
2. Mewujudkan koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien.
3. Menyediakan informasi hasil pengawasan APIP secara nasional sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi.

E. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASI

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1112/XII/2025 Tanggal 1 Desember 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor Kpts.3743/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Adapun Program Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Riau Tahun 2025 adalah Program penunjang urusan pemerintahan, program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disajikan pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 PKPT Berbasis Risiko Inpektorat Daerah Provinsi Riau

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AUDIT						
1	Audit Kinerja	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
2	Audit Operasional/Ketaatan	17	251.050.000,00	20	205.723.750,00		
3	Pemeriksaan BUMD (audit CSR)	2	74.116.250,00	2	62.026.250,00		
4	Probity Audit	7	149.250.000,00	7	25.030.000,00		
5	Pengawasan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah	6	233.093.750,00	6	190.132.500,00		
6	Audit Terhadap Pengelolaan Belanja Daerah (hibah, perjalanan dinas, penyertaan modal)						
a	Audit Hibah	21	190.395.000,00	19	180.770.000,00		
b	Audit Pengelolaan Kas dan Deposito (cash opname)	34	53.375.000,00	36	56.875.000,00		
7	Audit Tujuan Tertentu						
a.	Audit Investigasi/perhitungan PKKN	9		14	138.537.000,00		
	Tindakanlanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi		926.162.000,00				
b		10		10	61.628.150,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pemeriksaan atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Audit Kepatuhan)	5	8.750.000,00	6	13.125.000,00		
9	Pemeriksaan Atas Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pembangunan	15	340.950.000,00	44	94.675.000,00		
10	Audit Honorarium	1	0	1	0,00		
11	Laporan Hasil Audit Renovasi Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi Riau yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024					1	0,00
12	Laporan Hasil Klarifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Pedamaran II pada Ruas Jalan Bagan Siapi api - Teluk Piyai (Kubu) (Lanjutan) Tahun Anggaran 2024.					1	4.375.000,00
13	Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Pedamaran II Pada Ruas Jalan Bagansiapiapi - Teluk Piyai (Kubu) (Lanjutan).					1	17.141.250,00
14	Laporan Hasil Audit atas Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perkantoran Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.					1	3.750.000,00
15	Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Kegiatan yang sedang berjalan pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.					1	8.100.000,00
Jumlah A		128	2.237.642.000,00	165	1.039.022.650,00	5	33.366.250,00
B	REVIU						
1	Reviu RKPD oleh APIP	2	15.000.000,00	2	7.500.000,00		
2	Reviu KUA PPAS Murni dan Perubahan	2	16.500.000,00	2	9.000.000,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Reviu Renja OPD 2026	33	12.500.000,00	68	22.500.000,00		
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	13.125.000,00	1	48.825.000,00		
5	Reviu RKA OPD	33	12.500.000,00	0	0,00		
6	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP)	1	24.500.000,00	33	24.500.000,00		
7	Reviu Pelayanan Publik	2	15.600.000,00	2	9.450.000,00		
8	Reviu SSH, ASB dan HSPK	1	10.850.000,00	1	11.375.000,00		
9	Reviu HPS	5	13.270.000,00	5	39.028.500,00		
10	Reviu Atas Manajemen ASN dan Rotasi, Promosi dan Mutasi	1	9.750.000,00	1	1.950.000,00		
11	Reviu SAKIP OPD	34	31.500.000,00	0	0,00		
12	Reviu DAK	7	35.900.000,00	14	67.150.000,00		
13	Reviu DAU	1	3.750.000,00	6	37.665.000,00		
14	Reviu BMD	1	9.750.000,00	1	8.100.000,00		
15	Reviu atas Bantuan Sosial	1	9.750.000,00	1	8.250.000,00		
16	Reviu RUP	1	5.250.000,00	1	4.200.000,00		
17	Reviu Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah	1	9.750.000,00	1	5.250.000,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Laporan Hasil Reviu Rencana Penanganan Jembatan Sei Rokan Kiri pada Ruas jalan Tandun - Pasir Pangaraian Menggunakan Dana BTT Provinsi Riau.					1	13.650.000,00
19	Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau Tahun 2024.					1	16.100.000,00
20	Laporan Hasil Reviu Penyajian Hutang di Neraca atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dumai - Lubuk Gaung - Batu Teritip (Batas Kab. Rokan Hilir)(Lanjutan) Tahun Anggaran 2024 Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.					1	0,00
21	Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.					1	14.525.000,00
22	Laporan Reviu Dokumen Pembayaran Acara Pengunduran dan Pembatalan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Provinsi Riau Tahun 2025					1	7.350.000,00
23	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.					1	14.938.750,00
24	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.					1	
25	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.					1	7.127.500,00

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar.					1	
27	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.					1	5.525.000,00
28	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.					1	5.672.500,00
29	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kota Dumai.					1	6.392.500,00
30	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.					1	13.270.000,00
31	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.					1	
32	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kep. Meranti.					1	9.580.000,00
33	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Laporan Hasil Reviu Atas Kecukupan dan Ketersediaan Anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.					1	15.150.000,00
35	Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja Tidak terduga Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Tahun Anggaran 2025					1	3.600.000,00
36	Laporan Hasil Reviu usulan Anggaran Pengadaan Mebelair Pasca Kebakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.					1	3.300.000,00
37	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025					1	4.500.000,00
38	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029					1	25.500.000,00
39	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Sekretaris Daerah Provinsi Riau.					1	25.500.000,00
40	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Riau.					1	
41	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.					1	25.500.000,00
43	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.					1	
44	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Sosial Provinsi Riau.					1	
45	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.					1	
46	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.					1	
47	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.					1	
48	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.					1	
49	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Disperindagkop Provinsi Riau.					1	25.500.000,00
51	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.					1	
52	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.					1	
53	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.					1	
54	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau.					1	
55	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau.					1	
56	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.					1	25.500.000,00
58	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Pangan, Tanaman dan Holtikultura Provinsi Riau.					1	
59	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.					1	
60	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada BappedaLitbang Provinsi Riau.					1	
61	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.					1	
62	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.					1	
63	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.					1	25.500.000,00
65	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.					1	
66	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.					1	
67	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.					1	
68	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.					1	
69	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau.					1	
70	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Badan Penghubung Provinsi Riau.					1	

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.					1	
72	Laporan Hasil Reviu Atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Perwakilan Riau TA 2024 atas Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Provinsi Riau.					1	0,00
Jumlah B		127	249.245.000,00	139	304.743.500,00	54	196.761.250,00
C	EVALUASI						
1	Evaluasi Atas Upaya Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	1	17.500.000,00	1	0,00		
2	Evaluasi penurunan prevalensi stunting	1		1	17.500.000,00		
3	Evaluasi Pengangguran Terbuka	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
4	Evaluasi Pengendalian inflasi	1	16.450.000,00	1	16.450.000,00		
5	Evaluasi Peningkatan Investasi	1	15.750.000,00	1	15.750.000,00		
6	Evaluasi Swasambada Pangan	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
7	Evaluasi Terhadap Rasio Gini	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
8	Evaluasi MR	1	22.200.000,00	1	22.200.000,00		
9	Evaluasi Reformasi Birokrasi tematik dan general	1	23.100.000,00	6	13.350.000,00		
10	Evaluasi Penyerapan Anggaran PBJ	4	35.000.000,00	0	0,00		
11	Evaluasi SAKIP OPD	34	36.750.000,00	33	68.250.000,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Evaluasi atas SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
13	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota	12	125.615.500,00	0	0,00		
14	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
Jumlah C		61	349.865.500,00	49	211.000.000,00	0	0
D	MONITORING DAN EVALUASI						
1	Monev Terhadap Mitigasi dan Pemenuhan Eksistensi Fraud Control Plan (FCP)	5	31.325.000,00	5	31.325.000,00		
2	Monitoring implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANASPK)	1	46.200.000,00	0	0,00		
Jumlah D		6	77.525.000,00	5	31.325.000,00	0	0
E	MONITORING						
1	Monitoring atas kepatuhan LHKASN/LHKPN	2	83.650.000,00	2	60.550.000,00		
2	Monitoring atas Laporan Pengendalian Gratifikasi	4	46.200.000,00	0	0,00		
3	Monitoring Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi (MCP KPK)	1	25.200.000,00	1	0,00		
4	Monitoring WBS	1	11.200.000,00	0	0,00		
5	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	2	140.705.000,00	1	12.600.000,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Monitoring atas BKK Desa	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
7	Monitoring Capaian IKK pada aplikasi CRCM	2	0,00	1	0,00		
8	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 4	1	750.000,00	0	0,00		
9	Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025.					1	0,00
10	Laporan Monitoring Penangan Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SSMA dan SMK Di Provinsi Riau					1	3.600.000,00
Jumlah E		14	313.705.000,00	6	79.150.000,00	2	3.600.000,00
F	PENDAMPINGAN/ADVISORY						
1	Asistensi atas Implementasi SPIP	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00		
2	Qualiti Assurance atas pelaksanaan SPIP	1	35.400.000,00	1	0,00		
3	Pendampingan Penyuluhan Desa Percontohan Anti Korupsi	2	113.350.000,00	0	0,00		
4	Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten/Kota se Provinsi (PAKSI)	4	119.760.000,00	0	0,00		
5	Asistensi atas penyusunan Fraud Control Plan (FCP)	4	29.575.000,00	8	10.500.000,00		
6	Penilaian mandiri atas Pelaksanaan Efektifitas Pengelolaan Korupsi (IEPK)	1	12.250.000,00	0	0,00		
7	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)	2	14.500.000,00	0	0,00		

NO	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sosialisasi atas laporan pengendalian gratifikasi	1	11.550.000,00	0	0,00		
9	Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	1	6.300.000,00	1	13.050.000,00		
10	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	1	20.252.500,00	3	3.500.000,00		
11	Sosialisasi WBS	1	2.800.000,00	0	0,00		
12	Pendampingan Tim BPK	2	36.651.000,00	1	34.516.250,00		
13	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP LVL 4	1	17.250.000,00	1	17.250.000,00		
14	Asistensi manajemen risiko	2	34.650.000,00	1	34.650.000,00		
15	Penjamin kualitas MR	1	35.400.000,00	0	0,00		
16	Laporan Hasil Pendampingan Program Strategis Nasional di Provinsi Riau					1	0,00
Jumlah F		25	525.088.500,00	18	148.886.250,00	1	0,00
G	PENGEMBANGAN KOMPETENSI						
1	Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 jam per tahun	1	191.928.354,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah G		1	191.928.354,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		362	3.944.999.354,00	384	2.006.035.754,00	62	233.727.500,00

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A.AUDIT

Pemeriksaan atau audit yang dilakukan merupakan evaluasi atas suatu organisasi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap OPD/ lembaga di lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Tujuan pemeriksaan atau audit adalah melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah berjalan sesuai dengan standar maupun regulasi yang telah disetujui dan diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan audit sebagai proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan audit sebagai berikut:

1. Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah proses evaluasi untuk menilai apakah suatu instansi atau program telah mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang berisiko penyimpangan, memastikan ketaatan, mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Ruang lingkupnya mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan SDM, keuangan, dan pelaksanaan kegiatan.

Sampai akhir Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan audit ketaatan di Pemerintah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Ketaatan atas Kegiatan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
2. Audit Ketaatan pada Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d Semester I Tahun Anggaran 2025

3. Audit Ketaatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d Semester I Tahun Anggaran 2025.
4. Audit Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat daerah Provinsi Riau. Jasa Penyelenggaraan Jambore Provinsi Riau.
5. Audit Ketaatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025
6. Audit Ketaatan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025.
7. Audit Ketaatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025.
8. Audit Ketaatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025.
9. Audit Ketaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025.
10. Audit atas Pekerjaan Pembangunan Hanggar dan Helipad di Mapolda Riau pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
11. Audit Ketaatan (Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau T.A. 2025.
12. Audit Ketaatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode Semester I dan II (Januari s.d. Agustus) Tahun 2025.
13. Laporan Hasil Audit Ketaatan (Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan & Keuangan) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau T.A. 2024 dan 2025.
14. Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Jambore Karhutla Provinsi Riau Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Dukungan Jambore Karhutla Tahun 2025 dan Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Karhutla nasional Tahun 2025.
15. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2024 dan Semester 1 tahun anggaran 2025.

16. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada dinas pendidikan provinsi Riau tahun anggaran 2024 dan tahun 2025.
17. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau Periode Semester I dan II (Januari s.d. 31 Oktober 2025).
18. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025.
19. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
20. Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.



Gambar 3
Pelaksanaan Audit Ketaatan

2. Audit Dana Hibah

Audit dana hibah adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana hibah yang diberikan telah dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 telah melaksanakan audit dana hibah pada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Special Olympics Indonesia (SOINA), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Gerakan Pramuka Kwatir Daerah Riau (KWARDA), Komisi Penanggulangan AIDS (KPAIDS), National Paralympic Committee

(NPC), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komisi Penyiaran Daerah (KPID), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Forum Pembauran Kebangsaan Riau, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat (BAZNAS), Badan Pengelola Masjid Raya Nurul Wathan, Palang Merah Indonesia (PMI), Komando Resort Militer (Korem), Resimen Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Fakultas Kedokteran Universitas Riau.



Gambar 4
Pelaksanaan Audit Dana Hibah

Hasil audit dana hibah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan, disajikan sesuai tabel 3 berikut:

Tabel 3
Temuan APIP Hasil Audit Dana Hibah Tahun 2025

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	6
	Temuan Ketidak patuhan Terhadap Peraturan	1.00.00	0	0,00

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	6
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	53	1.417.076.210,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	5	43.395.218,47
4	Administrasi	1.04.00	16	88.688.874,00
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0,00
	Subtotal kejadian		74	1.549.160.302,47
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00	0	0,00
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	5	0,00
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	2	0,00
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0,00
	Subtotal Kejadian		7	0,00
	Temuan 3 E	3.00.00	0	0,00
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidak harmonisan	3.01.00	0	0,00
2	Ketidakefisienan	3.02.00	1	0,00
3	Ketidakefektifan	3.03.00	1	17.498.200,00
	Subtotal Kejadian		2	17.498.200,00
	Jumlah Kejadian		83	1.566.658.502,47

- b. Berdasarkan Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai tabel 4 berikut:

Tabel 4

Rekomendasi Temuan APIP Hasil Audit Dana Hibah

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	5
1	Penyetoran ke Kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	72	1.566.658.502,47
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	0	0,00
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan penghapusan BMN/BMD	0	0,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0,00
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	21	0,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	11	0,00
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	4	0,00
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sistem pengendalian	0	0,00
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	11	0,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	0,00
11	Koordinasi antar Instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi berwenang	0	0,00
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0,00
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0,00
14	Lain-lain	0	0,00
	Jumlah Kejadian	119	1.566.658.502,47

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. ADTT mencakup pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas pelaksanaan kegiatan atau program tertentu, serta menyelidiki dugaan penyimpangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan pengawasan audit dengan tujuan tertentu seperti audit investigatif (sedang berjalan), audit perhitungan kerugian negara/daerah, pengaduan masyarakat dan audit tujuan tertentu lainnya.

Untuk realisasi audit dengan tujuan tertentu berdasarkan jenis audit tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				NON PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OA	Realisasi Jumlah Dana OA Yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Audit Investigasi/ Perhitungan PKKN	19	926.162.000,00	13	138.537.000,00		
2.	Pengaduan masyarakat			10	61.628.150,00		
Jumlah		19	926.162.000,00	23	200.165.150,00		

Untuk hasil audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke instansi penyidik sebagaimana tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2025

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	1	-	708.800.000,00	-
JUMLAH	1	-	708.800.000,00	-

Untuk hasil audit investigatif berindikasi tindak pidana korupsi (TKP) yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel 7 :

Tabel 7

Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2025

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas	
1	2	3	4	5	6
Penyidik	1	-	80.150.000,00	-	-
JUMLAH	1	-	80.150.000,00	-	-

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,APIP mengikuti kode etik dan standar audit yang ada. Untuk kode etik dan standar audit yang digunakan dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8

Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang Undangan
1	2
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia	Peraturan Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021
Kode Etik APIP Provinsi Riau	Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2023
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Peraturan Gubernur Riau nomor Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Tentang Struktur Organisasi Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

B. REVIU

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan reviu sebagai penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas

bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus reviu antara lain :

1. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD), Renja, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/ PPAS;
2. Reviu DAK
3. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu tata kelola pengadaan barang dan jasa;
5. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Reviu SSH, ASB dan HSPK;
7. Reviu HPS;
8. Reviu atas manajemen ASN dan Rotasi, Promosi dan Mutasi;

Sampai akhir tahun 2025 telah dilakukan kegiatan reviu di Pemerintah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :

1. Reviu RENSTRA
Reviu Rancangan Akhir Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah sesuai RPJMD dan telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Ruang lingkup Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terbatas pada:
 - a. Konsistensi dan keterhubungan antara dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra dengan dokumen RPJMD;
 - b. Keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra.

Reviu Renstra dilakukan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pangan, Tanaman pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, BPKAD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Penghubung, Dinas Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PUPRPKPP, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bapenda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan.

2. **Reviu DAK**

Reviu DAK memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Reviu dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas pangan Tanaman dan Hortikultura, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi dan RSJ Tampan.

3. **Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4. **Reviu tata kelola pengadaan barang dan jasa**

Reviu ini adalah proses evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses PBJ pemerintah berjalan sesuai aturan.

5. **Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Riau Tahun 2025 telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

6. **Reviu SSH, ASB dan HSPK**

Tujuannya adalah untuk memastikan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah (APBD) akurat, wajar, dan efisien, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan kesesuaian data harga, dan mendukung penyusunan anggaran yang akuntabel.

7. Reviu HPS

Menilai dan memberikan saran perbaikan atas proses penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu tersebut dilaksanakan pada SMKN 1 Tuah Kemuning Kab. Indragiri Hilir dan SMKN Perikanan Kota Dumai.

8. Reviu atas manajemen ASN dan Rotasi, Promosi dan Mutasi

Evaluasi komprehensif untuk memastikan proses kepegawaian berjalan efektif, sesuai regulasi (seperti UU ASN, PP Manajemen PNS, dan Sistem Merit), mencegah korupsi, dan meningkatkan kompetensi serta kinerja pegawai dengan perpindahan jabatan untuk pengembangan karier, motivasi, dan pengalaman baru.



Gambar 5
Pelaksanaan Reviu

Jumlah objek reviu untuk Tahun 2025 disajikan pada Gambar 5:
:



Gambar 6
Jumlah Objek Reviu Tahun 2025

C. EVALUASI

Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 telah melakukan evaluasi, dengan output sebanyak 49 laporan, dengan uraian sebagai berikut:



Gambar 7
Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk

menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Riau.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD

EPPD yaitu mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Evaluasi SAKIP/LAKIP

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan program yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

4. Evaluasi Lainnya

Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Seperti evaluasi atas upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, evaluasi penurunan prevalensi stunting, evaluasi penggangguran terbuka, evaluasi pengendalian inflasi, evaluasi peningkatan investasi, evaluasi swasembada pangan, evaluasi terhadap rasio gini, evaluasi MR, evaluasi reformasi birokrasi tematik dan general, evaluasi atas spm kabupaten/kota di provinsi riau, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi bertujuan mengetahui perkembangan dan tindak lanjut dari rencana tindak pengendalian dari OPD dalam melaksanakan mitigasi dan pemenuhan eksistensi *Fraud Control Plan (FCP)* pada OPD percontohan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.



Gambar 8
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

E. MONITORING

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan monitoring yaitu pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Inspektorat Daerah Provinsi Riau juga telah melakukan monitoring capaian IKK pada aplikasi CRCM dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI dan APIP. Hasil pemantauan terhadap laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diukur capaiannya sebagai berikut

Tabel 9
Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut
Tahun 2025

NO	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	BPK RI	1.338	3.904	3.107	79,59
2	APIP	10.902	16.461	12.575	76,39

F. PENDAMPINGAN/ADVISORY

Pada Tahun 2025 , Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melakukan pendampingan terinci pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10
Pendampingan/Advisory Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025

NO	Kegiatan	Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Asistensi atas Implementasi SPIP	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00
2	<i>Quality Assurance</i> atas pelaksanaan SPIP	1	35.400.000,00	1	0,00
3	Pendampingan Penyuluhan Desa Percontohan Anti Korupsi	2	113.350.000,00	0	0,00
4	Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten/Kota se Provinsi (PAKSI)	4	119.760.000,00	0	0,00
5	Asistensi atas penyusunan <i>Fraud Control Plan</i> (FCP)	4	60.900.000,00	8	10.500.000,00
6	Penjamin kualitas atas Pelaksanaan Efektifitas Pengelolaan Korupsi (IEPK)	1	12.250.000,00	0	0,00
7	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)	2	14.500.000,00	0	0,00

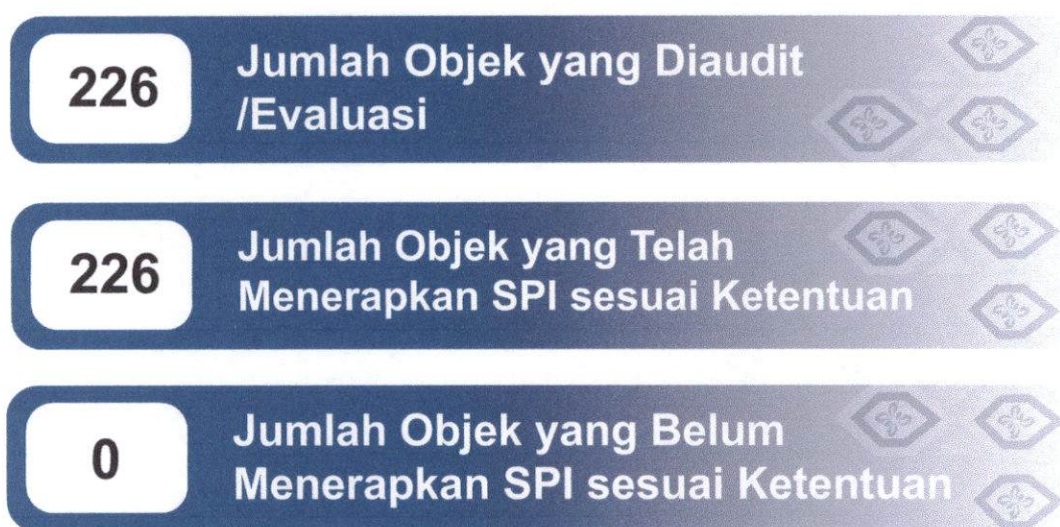
NO	Kegiatan	Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Sosialisasi atas laporan pengendalian gratifikasi	1	11.550.000,00	0	0,00
9	Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	1	6.300.000,00	1	13.050.000,00
10	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	1	20.252.500,00	3	3.500.000,00
11	Sosialisasi WBS	1	2.800.000,00	0	0,00
12	Pendampingan Tim BPK	2	36.651.000,00	2	34.516.250,00
13	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP LVL 4	1	18.000.000,00	1	17.250.000,00
14	Asistensi Manajemen Resiko	2	34.650.000,00	1	34.650.000,00
15	Penjamin Kualitas MR	1	35.400.000,00	0	0,00
Jumlah		25	525.088.500,00	18	148.866.250,00

Hasil pendampingan Manajemen Resiko yang dilakukan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan memberikan pemahaman dan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengelolaan risiko yang ada pada Tingkat Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategi Perangkat Daerah dan Risiko Operasional Perangkat Daerah telah memberikan kontribusi yang maksimal.



Gambar 9
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, Auditor telah memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Adapun hasil audit dan evaluasi dapat dijelaskan sebagaimana gambar 9 berikut :



Gambar 10
Jumlah Objek Audit/ Evaluasi Yang Menerapkan SPI
Tahun 2025

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)

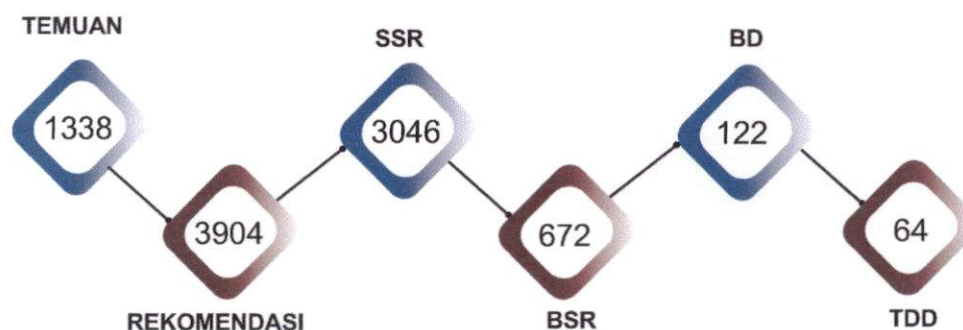
Berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK RI.



Gambar 11
Pemantauan BPK RI

Capaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 adalah 78% (data sesuai gambar 11)

LAPORAN TLRHP BPK RI



Gambar 12
Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakanlanjutan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2005 s.d Tahun 2025

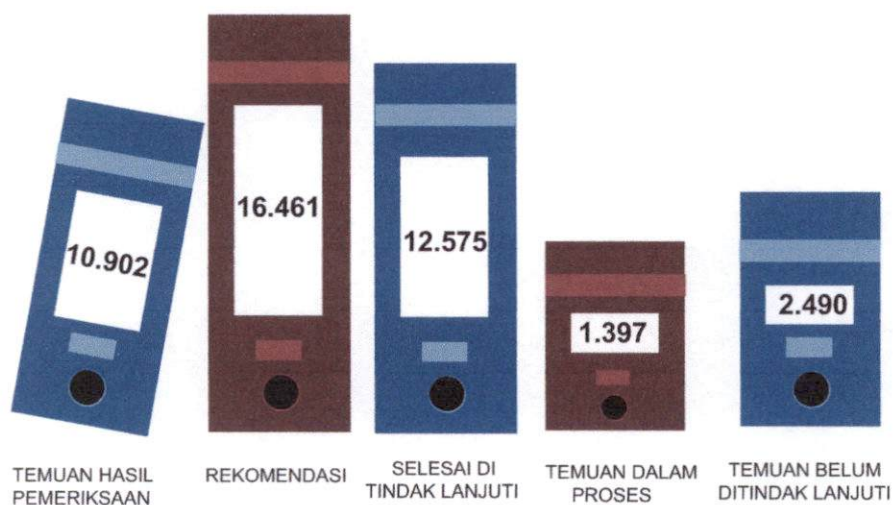
B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, capaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tahun 2025 adalah 76,39% .



Gambar 13
Pelaksanaan Pemantauan APIP

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT APIP TAHUN 2025

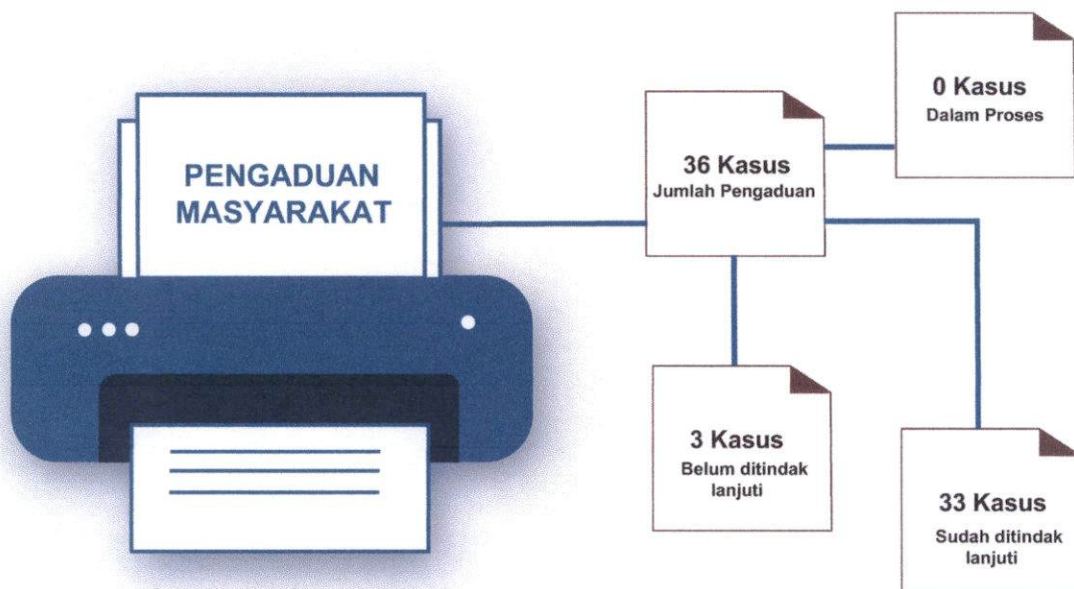


Grafik 1
**Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak lanjut APIP
Tahun 2025**

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Capaian indikator persentase penanganan pengaduan masyarakat sebesar 91,67%. Hal ini dikarenakan dari target penanganan pengaduan masyarakat sebesar 36 kasus, telah dapat direalisasikan penanganan sebesar 33 kasus (data sesuai grafik 4).



Grafik 2
Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus
Tahun 2025

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan Uraian BAB II sampai dengan bab IV dapat disimpulkan :

1. Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu audit kinerja, audit ketaatan, audit CSR, Probity audit, audit hibah, *cash opname*, audit tujuan tertentu, pengawasan masa akhir jabatan kepala daerah, pemeriksaan atas penetapan sanksi daftar hitam, pemeriksaan atas verifikasi tunggakan pembayaran Pembangunan, dan audit honorarium.
2. Kegiatan reviu yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu reviu RKPD, Reviu KUA PPAS murni dan perubahan, Reviu renja, reviu laporan keuangan pemerintah daerah, reviu pelayanan publik, reviu LKjIP, Reviu SSH, ASB dan HSPK, reviu HPS, reviu atas manajemen ASN, rotasi, promosi, dan mutasi, reviu DAK, reviu DAU, reviu BMD, reviu atas bantuan sosial, reviu RUP, reviu optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
3. Kegiatan evaluasi yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu evaluasi upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, evaluasi penurunan prevalensi stunting, evaluasi penggangguran terbuka, evaluasi pengendalian inflasi, evaluasi peningkatan investasi, evaluasi swasembada pangan, evaluasi terhadap rasio gini, evaluasi MR, evaluasi reformasi birokrasi tematik dan general, evaluasi SAKIP OPD, evaluasi atas SPM kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRG).
4. Kegiatan Monev yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu terhadap Mitigasi dan Pemenuhan Eksistensi Fraud Control Plan (FCP) dan kegiatan monitoring yaitu monitoring atas kepatuhan LHKASN/ LHKPN, monitoring capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi (MCP KPK), monitoring atas BKK desa, dan monitoring capaian IKK pada aplikasi CRCM.
5. Kegiatan Pengawasan lainnya yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu asistensi atas implementasi SPIP *Quality assurance* atas pelaksanaan SPIP asistensi atas penyusunan *Fraud Control Plan* (FCP) , asistensi pembangunan zona integritas menuju WBK, operasionalisasi sapu sapu bersih pungutan liar,

pendampingan tim BPK, penilaian mandiri kapabilitas APIP level 4, dan asistensi manajemen risiko.

6. Kegiatan pemeriksaan tindak lanjut BPK dan APIP diperoleh sebagai berikut:

A. Kegiatan pemantauan TL terhadap BPK RI tahun 2025 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama 2005 s/d 2025 diperoleh jumlah temuan sebanyak 3.905 kasus dan nilai kerugian daerah sebanyak Rp1.895.543.110.461,57. Dari temuan tersebut kondisi sampai 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Temuan yang sudah ditindaklanjuti adalah 3.107 kasus dengan nilai sebesar Rp713.429.862.809,52 (79,59%).
- b. Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 715 kasus dengan nilai sebesar Rp.381.495.614.770,31
- c. Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 18 kasus dengan nilai sebesar Rp1.339.130.115,01

B. Kegiatan pemantauan TL terhadap APIP tahun 2025 adalah pemantauan terhadap temuan APIP selama 2010 s/d 2025 diperoleh jumlah temuan sebanyak 10.902 kasus dan nilai kerugian daerah sebesar Rp180.548.543.114,29. Kondisi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Temuan yang sudah ditindaklanjuti adalah 12.575 kasus dengan nilai sebesar Rp142.137.914.669,18 (76,39%).
- b. Temuan yang dalam proses sebanyak 1.397 kasus.
- c. Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.490 kasus dengan nilai sebesar 38.410.628.445,11 (91,67%).

7. Hasil penanganan kasus pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 36 kasus.

B. HAMBATAN

1. Hambatan yang paling besar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2025 adalah keterbatasan anggaran.
2. Kurangnya kesadaran Objek pemeriksaan akan pentingnya untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

C. REKOMENDASI

1. Memperkuat kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat mitra kerja, BPK dan Itjen kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis.
2. Lebih aktif dalam hal pemantauan tindak lanjut sehingga tindak lanjut dapat segera diproses oleh audit
4. Melaksanakan *consultant activity* secara aktif terutama temuan-temuan yang sering muncul sehingga tidak terjadi temuan berulang.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan agar tindak lanjut dapat segera terselesaikan dengan baik.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2005 s.d. TAHUN 2025

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan (Rp)	
							SSR		BSR		BD		TDD			
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2005	3	44	555.606.606.078,13	102	474.963.208.724,13	81	466.401.975.868,23	17	8.561.232.855,90	0	0,00	4	0,00	466.401.975.868,23	
2	2006	5	61	55.557.744.394,54	137	22.924.665.735,48	125	14.889.358.421,05	9	8.035.307.314,43	1	0,00	2	0,00	14.192.720.029,05	
3	2007	4	59	45.867.273.696,87	138	10.501.436.121,87	132	9.048.085.535,87	6	1.453.350.586,00	0	0,00	0	0,00	18.754.716.143,87	
4	2008	5	63	10.298.000.403,38	121	8.498.000.403,38	101	982.458.924,54	15	7.515.541.478,84	0	0,00	5	0,00	982.458.924,54	
5	2009	3	74	46.050.898.024,05	323	45.829.306.497,35	271	26.553.790.315,98	32	19.275.516.181,37	1	0,00	19	0,00	26.553.790.315,98	
6	2010	4	81	147.016.053.546,15	184	49.963.894.059,15	158	7.339.788.165,95	21	42.624.105.893,20	0	0,00	5	0,00	7.321.608.703,95	
7	2011	5	105	54.988.129.991,60	228	33.110.018.302,52	203	22.485.529.998,37	16	10.619.460.806,07	0	0,00	9	5.027.498,08	23.895.206.228,87	
8	2012	5	151	398.017.587.970,95	426	57.316.156.878,28	367	8.527.212.182,52	43	47.986.979.804,16	2	796.854.091,60	14	5.110.800,00	17.875.556.197,26	
			1	10.550,00	1	10,00	1	10,00	0	-	0	-	0	-	10.550,00	
9	2013	3	62	64.183.098.509,54	133	18.175.132.200,41	120	17.995.735.142,26	7	179.397.058,15	1	0,00	5	0,00	20.661.643.076,05	
			0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	-	0	1.100.000,00	0	-	0	-	-	
10	2014	3	89	158.507.731.515,23	276	149.667.641.544,42	237	3.264.410.247,47	37	146.403.231.296,95	2	0,00	0	0,00	12.113.500.218,28	
11	2015	3	81	154.362.918.625,56	205	52.884.880.066,31	195	48.046.372.153,32	10	4.838.507.912,99	0	0,00	0	0,00	1.190.817.490,32	
12	2016	4	60	5.862.408.017,67	174	5.761.418.017,67	154	4.008.993.230,83	20	1.752.424.786,84	0	0,00	0	0,00	4.109.983.230,83	
13	2017	3	54	27.635.498.613,06	128	27.147.123.083,06	115	9.330.719.682,41	11	7.416.433.518,84	1	0,00	1	10.399.969.881,81	11.414.753.259,12	
14	2018	2	37	22.087.514.482,43	111	21.190.297.994,54	95	18.258.363.864,07	16	2.931.934.130,47	0	0,00	0	0,00	14.553.988.475,73	
15	2019	3	51	11.419.093.033,61	111	11.133.896.160,60	104	6.720.313.902,01	7	4.413.582.258,59	0	0,00	0	0,00	7.452.264.475,01	
16	2020	5	50	15.573.386.926,34	195	13.542.316.454,34	181	6.025.258.335,39	14	7.517.058.118,95	0	-	0	-	7.196.459.504,50	
17	2021	4	46	10.038.627.520,15	182	10.038.627.520,15	136	4.782.740.679,25	44	4.760.788.850,49	2	495.097.990,41	0	-	7.381.900.728,63	
18	2022	4	68	21.359.725.276,87	284	17.265.698.169,70	130	10.749.949.035,92	153	6.515.749.133,78	1	-	0	-	13.422.189.471,23	
19	2023	5	56	43.148.320.222,10	241	38.639.538.798,64	121	21.020.358.660,08	120	17.619.180.138,56	0	-	0	-	26.553.610.063,36	
20	2024	3	27	18.925.860.159,03	108	14.096.533.407,81	20	2.527.780.179,83	58	11.568.753.227,98	30	-	0	-	7.225.850.803,73	
21	2025	1	19	29.036.633.454,31	97	24.024.925.734,92	28	4.259.497.833,17	61	19.718.249.868,75	8	47.178.033,00	0	-	-	
Jumlah		77	1338	1.895.543.110.461,57	3904	1.106.674.715.874,73	3107	713.429.862.809,52	715	381.495.614.770,31	18	1.339.130.115,01	64	10.410.108.179,89	707.020.599.187,84	79,59

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAKLANJUT APIP

TAHUN 2025											
Kode	HASIL PEMERIKSAAN	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI		DALAM PROSES		BELUM DITINDAKLANJUTI		Persentase (%)
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Saran	Nilai (Rp)	Saran	Nilai (Rp)	Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2010-2019	7.702	11.938	146.737.327.417,28	9.606	121.354.361.887,48	1.050		1.282	25.382.965.529,80	
B.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	283	469	3.091.161.947,83	372	2.293.659.154,49	56		41	797.502.793,34	
C.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2021	130	235	1.322.214.290,00	190	1.243.724.799,00	23		22	78.489.500,00	
D.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022	537	951	3.757.995.823,44	532	2.533.185.354,47	59		360	1.224.810.468,97	
E.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2023	621	1027	3.564.545.218,68	827	3.011.884.008,68	119		82	552.661.210,00	
F.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2024	1.445	1593	19.615.684.218,59	918	10.130.179.413,59	83		592	9.485.504.805,00	
G.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2025	184	248	2.459.614.189,47	130	1.570.920.051,47	7		111	888.694.138,00	
Total		10.902	16.461	180.548.543.114,29	12.575	142.137.914.669,18	1.397		2.490	38.410.628.445,11	76,39

**LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**

NO	NO. & TANGGAL SURAT AGENDA	a. PELAPOR b. TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI				KETERANGAN
				DALAM PROSES	SELESAI		PP/53 /2010	TP/ TGR	PIDANA	LAIN-LAIN	
					BENAR	TIDAK BENAR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. DITERIMA DARI KEMENTERIAN/ ITJEN											
1	X.700.1.2.4/52/D/JI Kemendagri		Pelimpahan surat Pengaduan (Ganti rugi pembebasan tanah pelebaran jl. Soekarno-Hatta Pekanbaru		√						201/LATT/INSP-RIAU/Ir.V/V/2025
2.	B-12/D-2/Dumas/DM.05/03/2025 KemenSesneg		Penyampaian pengaduan Saudara Datuok Majolelo Dkk. (Ninik Mamak Empat Suku sebagai Pemangku Adat Kenegerian Koto Aman, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, Prov. Riau		√						Surat Diturjukan kepada Bupati Kampar Inspektorat Tembusan)
3	Kemensesneg RI B-32/D-2/DUMAS/DM.05/08/2025 5 26 Agustus 2025		Pengaduan Masyarakat dari Saudara Misriono Dkk		√						TEMBUSAN
B. DITERIMA DARI PERMINTAAAN PIMPINAN											
1	No.1609/B-Ak.02.02/50/F/2025 Gubernur Riau		Klarifikasi dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemprov Riau		√						Surat Inspektur kepada POLDA RIAU

2	Pesan WA Masyarakat kepada Wakil Gubernur Riau (pada bulan Maret 2025)		Laporan masyarakat agar mengevaluasi Kepala Sekolah SMAN 4 Pekanbaru		√						129/LKH/INSP- RIAU/Ir.V/III/2025
3	Dedi Irawan, SP 15 September 2025		Pengaduan Perpindahan Antar OPD	√							
4	800/DISDIK/1.3/2025/71 01 Dinas Pendidikan		Permintaan Pemeriksaan Kepala Sekolah		√						214/LKH/INSP- RIAU/Ir.V/VI/2025 Tgl 13 Juni 2025
5	Dinas ESDM S/1375/800/DESDM/202 5 Desember 2025		Pemeriksaan Dugaan pelanggaran disiplin CPNS an. Muhammad Husein Rizky, ST di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau		√						
6	BKD 800.1.11.1/17939/BKD/2 025 Desember 2025		Dugaan Kelalaian Penanganan Pasien pada RSJ Tampar Provinsi Riau Tahun 2025		√						
7	Yuyun Primawahyuni, SKM 12 Desember 2025		laporan Perselingkuhan dan pernikahan siri a.n. Metra Fronika Sastra NIP 19810523 201001 1 024 dan Dessy Novita, SE.,M.Si NIP 19781220 200312 2 009			√					
C DITERIMA DARI PENGADUAN MASYARAKAT											
1	Pengaduan Bapak Arnold		Pengaduan Masyarakat		√						Tidak Memenuhi unsur pengaduan
2	Pengaduan Dr.Riadi A. Rahmat dan Patner nomor 013/P/LD-RAR/I/2025		Pengaduan dan Permohonan Audit terhadap PT. Sarana Pembangunan Riau		√						Diselesaikan oleh Kedua Belah Pihak
3	nomor 201/90/DPP-LMPN/ Riau/I/2025 DPP Prov Riau LMPN		Laporan Penggelembungan dana BOS pada SMAN 7 Pekanbaru		√						122/LKH/INSP- RIAU/Ir.V/III/2025
4	Pengaduan M. Arif Fiorisadeg		Pengaduan atas dugaan penelantaran Keluarga		√						Diproses Dinas Pendidikan
5	Pengaduan An Argus Marleimi Binti Syamsudin		Pengaduan Penelantaran Istri dan Anak serta Nikah tanpa izin 2 Kali		√						207/LATT WAN/INSP- RIAU/Ir.V/VI/2025

6	0193/KH-RS/III/2025 Rifaldo Sihombin & Rekan		Pengaduan dugaan tindak pidana Undang-Undang Pasal 421 KUHP (adanya Surat Penyetopan Pembersihan lahan oleh Pj Penghulu Teluk Pulau hilir)	√							
7	182/LP/DPP-SPR/II/2025 DPP Serikat Pekerja Riau		Laporan Kode Etik Etika pejabat pada Dinas Tenaga kerja		√						
8	027/LSM-FPHMT/R/V/2025 DPP Forum Pembela Hak-Hak Masyarakat Tempatan Justice Berjaya riau		Laporan pemberian janji kepala bidang pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja		√						
9			Laporan pengaduan		√						
10	Jumiran Masyarakat		Permohonan Audit Desa Mekarsari		√						Tidak Memenuhi unsur pengaduan
11	800.3.8.1/DISDIK/1.3/2025 /9437 Dinas Pendidikan		Permohonan Pemeriksaan atas Laporan Masyarakat		√						242/LKH/INSP-RIAU/Ir.I/VII/2025 22 Juli 2025
12	192.PP_GMPR.A-1.04.2025 DPP Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau		Laporan Pengaduan Dugaan fee Proyek Oleh Kepala Bidang bina marga Dinas PUPR		√						
13	LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau Nomor : ISTIMEWA		Pengaduan atas dugaan meminta-minta Uang oleh kepala Bidang Bina Marga dinas PUPR		√						
14	JASMADI 4 Juni 2025		Permohonan Pemeriksaan dan penegakan disiplin ASN (Dugaan Istri Menjalin hubungan khusu dengan atasannya)		√						241/LATT-WAN/INSP-RIAU/Ir.V/VII/2025 22 Juli 2025
15	ITJEN KEMENDIKDASMEN 2669/G.G5/RH3/WS.05.00/2025		Pelimpahan Laporan Pengaduan Masyarakat (tentang Pemotongan Dana PIP Kisaran pada SMAS Muhammdiyah Tembilahan		√						249/LATT/INSP-RIAU/Ir.V/VII/2025 29 Juli 2025

16	Serikat Pekerja Riau 197/LP/DPP- SPR/X/PKU.RIAU/2025		Aduan Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dan mal-administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau		√						
17	Petisi Guru dan Tenaga Pendidik SMAN 1 Sinaboi Rohil		Menuntut Pertanggungjawab Kepala SMAN 1 Sinaboi		√						315/LATT/INSP- RIAU/Ir.V/X/2025
18	Ira Yanita, SE, Msi 04 September 2025		Laporan Perselingkuhan/ Perzinahan PNS di lingkungan Pemprov An. Chairuddin Surya Putra dan Syarifah Perita Musfita		√						316/LATT WAN/INSP- RIAU/Ir.V/X/2025
19	Efendy A. S.Pd 16 September 2025		Pengaduan Pelanggaran Hukum oleh ASN (SMKN 1 Lubuk Dalam)		√						
20	KAJATI RIAU R- 872/L4/Fo.2/12/2025 02 Desember 2025		Laporan Pengaduan Masyarakat dari Forum Antipati terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 dalam Kegiatan Belanja Sewa Jaringan Internet Main/ Utama dan Kegiatan Belanja Sewa Jaringan Internet <i>Backup/Failover</i> pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau.		√						Kesimpulan dari Kejaksaan Tinggi Riau: 1.Merupakan Laporan yang tidak Benar 2.Tidak Menunjukkan adanya Penyimpangan (Mark Up)

D DITERIMA DARI PERMINTAAN APH											
1	No.B/.../II/RES.3.5/2025/RE SKRIM		Permintaan Audit POLRES Dumai		√						208/LATT/INSP-RIAU/Ir.V/VI/2025
2	B/746/IV/2025/Ditreskrimsus DITRESKRIMSUS		Permintaan ATT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pengadaan Sapi TA 2022)		√						Surat no 100.1.2/IP-IRBANV/791 Tanggal 03 Juni 2025
3	Kejaksaan Negeri Siak R-65/L.4.17/Fd.1/06/2025 23 Juni 2025		Permohonan audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS pada SMAN 1 Siak		√						251/LHA/INSP-RIAU/Ir.V/ VII/2025 31 Juli 2025
4	Kejaksaan Negeri Pelalawan B.2182/L.4.19/Fd.1/07/2025 04 Juli 2025		Permohonan audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam kegiatan penyaluran pupuk subsidi TA 2019 s.d. 2022 di Kec. Bandar Petalangan, Bunut, dan Pangkalan Kuras Kab Pelalawan		√						Nota Dinas Inspektur Nomor 100.1.2/ND/192 Tanggal 30 juli 2025 Perihal Ekspose Bantuan Audit
5	POLDA RIAU B/746/IV/2025/Ditreskrimsus		Permintaan Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022		√						
E DITERIMA DARI KEPEGAWAIAN											
1	Retno Putri 10 September 2025		Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang ASN dan Mediator Disnakertrans Prov Riau		√						

**REKAPITULASI LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OPD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN EVALUASI 2025**

NO	OPD	NILAI 2023	KATEGORI
1	Inspektorat	81.80	A (Memuaskan)
2	BAPPEDALITBANG	80.70	A (Memuaskan)
3	BPKAD	80.10	A (Memuaskan)
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	79.90	BB (Sangat Baik)
5	Badan Kepagawaian Daerah	78.80	BB (Sangat Baik)
6	Bapenda	78.35	BB (Sangat Baik)
7	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	77,85	BB (Sangat Baik)
8	Dinas Energi dan SDM	75.95	BB (Sangat Baik)
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75,25	BB (Sangat Baik)
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	74,80	BB (Sangat Baik)
11	Dinas Pendidikan	74,60	BB (Sangat Baik)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74,55	BB (Sangat Baik)
13	Dinas Pariwisata	74,55	BB (Sangat Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,20	BB (Sangat Baik)
15	Dinas Kesehatan	73,80	BB (Sangat Baik)
16	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	72,15	BB (Sangat Baik)
17	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	71,40	BB (Sangat Baik)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70,80	BB (Sangat Baik)
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	70,75	BB (Sangat Baik)
20	Dinas Perkebunan	70,70	BB (Sangat Baik)
21	Satpol PP	70,60	BB (Sangat Baik)
22	Dinas Sosial	70,45	BB (Sangat Baik)
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,15	B (Baik)
24	Dinas Perhubungan	69,90	B (Baik)
25	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	68.90	B (Baik)
26	Sekretariat DPRD	68,55	B (Baik)
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	68,15	B (Baik)
28	Dinas Kepemuda dan Olahraga	68,05	B (Baik)
29	Dinas Kebudayaan	67,70	B (Baik)
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	67,50	B (Baik)
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,45	B (Baik)
32	Badan Penghubung	64,85	B (Baik)
33	Sekretariat Daerah	61,45	B (Baik)

IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN

TAHUN 2025

Nomor : 481/IKHTISAR/INSP-RIAU/Ir.III
/XII/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

 (0761) 22300, Fax 23256

 inspektorat.riau.go.id

 Jl. Cut Nyak Dien - Pekanbaru